

## ABSTRAK

SUMARLIN, Hubungan Pemerintah Daerah Dan DPRD Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat, Pembimbing (I) : Dr.H.Muhlis Madani.M.Si, Pembimbing (II) : Andi Luhur Prianto.S.IP.M.Si

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat (DPR) merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan (Tajudin 5 : 2002)

Namun demokrasi paling umum dimaknakan sebagai tatanan kehidupan dimana warga negara menikmati kebebasan dan hak-hak dasarnya, serta ada jaminan hukum agar warga negara dapat mengekspresikan aspirasinya secara maksimal dan terbuka

Dari hasil penelitian diatas, penulis dapatlah menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat menjadi peraturan daerah adalah proses perubahan hutan lindung dari 1.700.000 Hektar menjadi 1.100.000 Hektar dimana  $\pm$  600.000 Hektar telah menjadi lahan pertanian masyarakat. Disisi lain menurut pengakuan kepala dinas pekerjaan umum bahwa adanya beberapa sektor jalan nasional yang telah mengalami pemindahan karena disebabkan proses pembangunan beberapa infrastruktur seperti proses perluasan bandara tanpa padang yang telah mengambil seluruh badan jalan nasional sehingga dimungkinkan untuk melakukan pemindahan jalan nasional tersebut. Faktor yang terakhir adalah proses penyesuaian sungai lariang dimana hulu sungai tersebut berada pada wilayah administrasi provinsi Sulawesi tengah sedangkan muarah sungai larian berada pada wilayah administrasi provinsi Sulawesi Barat.